

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo, 2016, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*, Alfabeta, Bandung.
- Amirudin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Saifudin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1986, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktik*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Chomzah, Ali Achmad, 2004, *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia Jilid 2*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Dewanta, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, FH UMY, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2005, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Effendi, Bachtiar, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*, Gava Media, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Ed. Revisi, Cet. 8*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Mantra, Ida Bagus, 2004, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Muhjad, M. Hadin, dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Moenir, A.S, 2008, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Nuswardani, S.H., M.H., Dr. Nunuk dan Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Parlindungan, A.P., 1998, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta.
- Sumarja, F.X., 2015, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjiptono, Fandy, 2006, *Manajemen Jasa*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Makalah dan Pidato:

- Sumardjono, Maria S.W, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Tanah, *Makalah*, Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-Pajak yang Terkait: Suatu Proses Sosialisasi dan Tantangannya, kerja sama Fakultas Hukum Gadjah Mada dan Badan Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 13 September 1997.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Kabupaten Magelang dalam Angka 2017, *Makalah*, BPS Kabupaten Magelang.
- Widodo, Joko, Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum, *Pidato*, Istana Negara, 20 September 2018.

Penelitian:

- Nadeak, Tongam, 2018, *Implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan*, Skripsi, Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.
- Sahprada, Karina Gita, 2018, *Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pedoman Penganugerahaan Piala Abdisatyabakti Bagi Unit Kerja/Kantor Pelayanan.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Website:

Anonymous, *Pengembangan Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, diakses dari <http://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2014/10/es-pening-kualipublik.pdf> diakses pada 11 Februari 2019.

Hapsari, Maria Ferina Tyas, 2015, *Program Nasional Agraria*, <http://www.hukumproperti.com/pertanahan/program-nasional-agraria/> , diakses pada 14 Oktober 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015, diakses dari <http://kbbi.web.id/pelayanan> diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kamusbahasaindonesia.org/kualitas> diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, diakses dari, <https://www.atrbpn.go.id/Tentang-Kami/Struktur-Organisasi-Pejabat/Kantor-Wilayah-Badan-Pertanahan-Nasional>, diakses pada 2 Januari 2019.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, diakses dari <https://www.atrbpn.go.id/Tentang-Kami/Struktur-Organisasi-Pejabat/Kantor-Wilayah-Badan-Pertanahan-Nasional> diakses pada 2 Januari 2019.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, diakses dari <https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Inovasi/Layanan-Monitoring-Online>, diakses pada 3 Januari 2019.

Land Registry and Registry of Deeds, diakses dari www.landregistry.ie diakses pada 2 Januari 2019.

Literatur lain:

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, 2017, *Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap: Bidang Yuridis*, Jakarta.